

42 hal



221/ 10-01-2007

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1415/MENKES/SK/XII/2006**

TENTANG

**POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Departemen Kesehatan di bidang pengelolaan kearsipan, telah ditetapkan Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 684/MENKES/PER/VIII/2006;
 - b. bahwa untuk melengkapi pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964).
 - 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1405/MENKES/SK/IX/2003 tentang Pedoman Tata Persuratan Departemen Kesehatan.
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 684/Menkes/Per/VIII/2006 tentang Pedoman Tata Kearsipan Dinamis Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DAN KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Kedua** : Pola Klasifikasi Arsip dan Kode Unit Pengolah di lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Ketiga** : Pola Klasifikasi dan Kode Unit Pengolah dimaksud Diktum Kedua agar digunakan sebagai acuan semua unit organisasi di lingkungan Departemen Kesehatan dalam pengelolaan tata persuratan dan kearsipan Departemen.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Desember 2006



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran I

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1415/MENKES/SK/XII/2006

Tanggal : 15 Desember 2006

POLA KLASIFIKASI

I. PENDAHULUAN

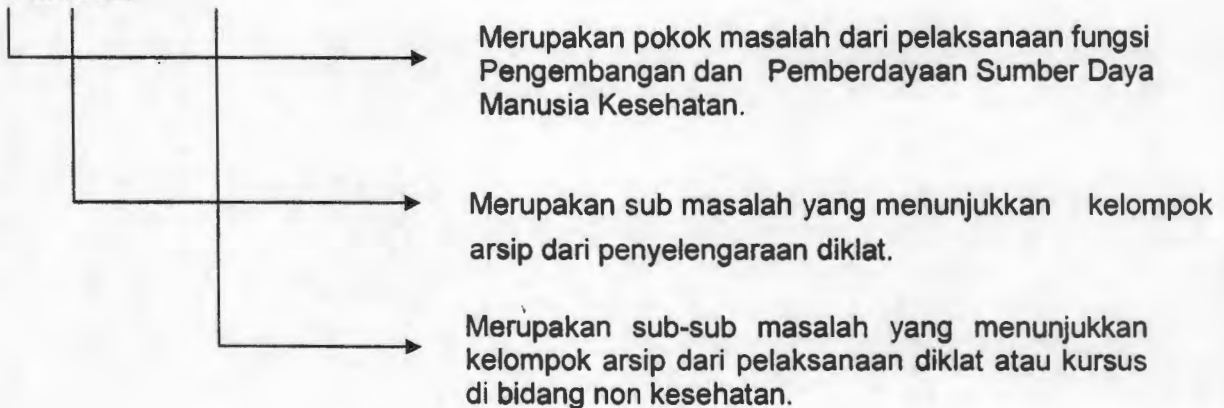
Pola klasifikasi digunakan untuk melakukan penataan berkas dengan sistem masalah. Adapun tujuan penggunaan pola klasifikasi ini adalah agar arsip yang masalahnya sama akan terkumpul/terkelompok dalam satu berkas sehingga penyimpanannya dapat dilakukan secara logis dan sistematis yang pada akhirnya akan memudahkan penemuan kembali.

Pola klasifikasi ini disusun secara berjenjang mulai dari pokok masalah, sub masalah dan sub-sub masalah. Ada dua unsur penting dalam klasifikasi ini yakni kode dan indeks. Kode digunakan untuk membedakan masalah utama sampai pada rinciannya, dan pada keputusan ini kode yang digunakan adalah kode *Alpha numeric*, yakni kode gabungan angka dan huruf. Sedangkan indeks digunakan sebagai sarana untuk mengenal dan mengatur arsip.

Pola klasifikasi ini dibedakan menjadi pola klasifikasi substantif dan pola klasifikasi fasilitatif. Pola klasifikasi substantif adalah pola klasifikasi dari kegiatan pokok Departemen Kesehatan sedangkan pola klasifikasi fasilitatif menggambarkan tugas-tugas yang mendukung kegiatan pokok.

Contoh penggunaan klasifikasi arsip :

DM 03.02





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

II. KLASIFIKASI SUBSTANTIF

BM : BINA KESEHATAN MASYARAKAT

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi mulai dari proses penyusunan sampai dengan selesai diterbitkan keputusan :

- 01.01. Kesehatan Ibu Hamil
- 01.02. Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
- 01.03. Kesehatan Maternal dan pencegahan komplikasi
- 01.04. Kesehatan Keluarga Berencana
- 01.05. Perlindungan Kesehatan Reproduksi
- 01.06. Kesehatan Bayi
- 01.07. Kesehatan anak Balita dan Pra Sekolah
- 01.08. Kesehatan Anak Usia Sekolah
- 01.09. Kesehatan Anak Remaja
- 01.10. Kesehatan Anak Khusus
- 01.11. Institusi Kesehatan dan UKBM
- 01.12. Upaya Kesehatan Perkotaan dan Olahraga
- 01.13. Upaya Kesehatan Daerah Tertinggal
- 01.14. Upaya Kesehatan Indera dan Usila Perbatasan dan Kepulauan
- 01.15. Kesehatan Tradisional
- 01.16. Gizi Makro
- 01.17. Gizi Mikro
- 01.18. Gizi Klinis
- 01.19. Konsumsi Makanan
- 01.20. Kewaspadaan Gizi
- 01.21. Pembinaan Pelayan Kerja Dasar
- 01.22. Pembinaan Pelayanan Kerja Rujukan
- 01.23. Teknologi Lingkungan Kerja
- 01.24. Sarana Lingkungan Kerja

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Bimbingan dan Evaluasi mulai dari pelaksanaan sampai dengan tersusunnya laporan :

- 02.01. Kesehatan Ibu Hamil



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 02.02. Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
- 02.03. Kesehatan Maternal dan pencegahan komplikasi
- 02.04. Kesehatan Keluarga Berencana
- 02.05. Perlindungan Kesehatan Reproduksi
- 02.06. Kesehatan Bayi
- 02.07. Kesehatan anak Balita dan Pra Sekolah
- 02.08. Kesehatan Anak Usia Sekolah
- 02.09. Kesehatan Anak Remaja
- 02.10. Kesehatan Anak Khusus
- 02.11. Institusi Kesehatan dan UKBM
- 02.12. Upaya Kesehatan Perkotaan dan Olahraga
- 02.13. Upaya Kesehatan Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan
- 02.14. Upaya Kesehatan Indera dan Usia Lanjut
- 02.15. Kesehatan Tradisional
- 02.16. Gizi Makro
- 02.17. Gizi Mikro
- 02.18. Gizi Klinis
- 02.19. Konsumsi Makanan
- 02.20. Kewaspadaan Gizi
- 02.21. Pembinaan Pelayan Kerja Dasar
- 02.22. Pembinaan Pelayanan Kerja Rujukan
- 02.23. Teknologi Lingkungan Kerja
- 02.24. Sarana Lingkungan Kerja

**DM : PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN.**

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyusunan Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan mulai dari proses perumusan kebijakan dan rancangan sampai dengan selesai diterbitkan keputusan :

- 01.01. Perencanaan dan Informasi SDM Kesehatan
- 01.02. Kemandirian dan Distribusi SDM Kesehatan
- 01.03. Perencanaan Tugas Belajar SDM Kesehatan
- 01.04. Sumber Daya Pendidikan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 01.05. Pengembangan Kurikulum
- 01.06. Kendali Mutu
- 01.07. Diklat Penjenjangan
- 01.08. Diklat Manajemen Kesehatan
- 01.09. Diklat Teknis dan Fungsional
- 01.10. Pemberdayaan Tenaga Kesehatan Indonesia
- 01.11. Pemberdayaan Tenaga Kesehatan Asing
- 01.12. Pemberdayaan Profesi Tenaga Kesehatan

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bimbingan dan Evaluasi mulai dari pelaksanaan sampai dengan tersusunnya laporan :

- 02.01. Perencanaan dan Informasi SDM Kesehatan
- 02.02. Kemandirian dan Distribusi SDM Kesehatan
- 02.03. Perencanaan Tugas Belajar SDM Kesehatan
- 02.04. Sumber Daya Pendidikan
- 02.05. Pengembangan Kurikulum
- 02.06. Kendali Mutu
- 02.07. Diklat Penjenjangan
- 02.08. Diklat Manajemen Kesehatan
- 02.09. Diklat Teknis dan Fungsional
- 02.10. Pemberdayaan Tenaga Kesehatan Indonesia
- 02.11. Pemberdayaan Tenaga Kesehatan Asing
- 02.12. Pemberdayaan Profesi Tenaga Kesehatan

03. PENYELENGGARAAN DIKLAT, KURSUS.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat, kursus mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya :

- 03.01. Bidang Kesehatan
- 03.02. Bidang Non Kesehatan

04. PENYELENGGARAAN SOSIALISASI, SEMINAR, KALAKARYA

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan sosialisasi, seminar, kalakarya mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaannya :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 04.01. Bidang Kesehatan
- 04.02. Bidang Non Kesehatan

JP : PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

01. PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN STANDAR

Naskah-naskah yang berhubungan dengan penyusunan kebijakan dan standar pembiayaan dan jaminan kesehatan mulai proses perumusan sampai dengan selesai diterbitkan keputusan :

- 01.01. Kepesertaan
- 01.02. Pemeliharaan Kesehatan
- 01.03. Pembiayaan

02. MONITORING DAN EVALUASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Monitoring dan Evaluasi mulai dari pelaksanaan sampai dengan tersusunnya laporan :

- 02.01. Kepesertaan
- 02.02. Pemeliharaan Kesehatan
- 02.03. Pembiayaan

KJ : PUSAT KAJIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi mulai dari rancangan sampai dengan selesai diterbitkan keputusan :

- 01.01. Penyusunan Jangka Pendek
- 01.02. Penyusunan Jangka Menengah
- 01.03. Penyusunan Jangka Panjang (SKN)

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

Naskah-naskah berkaitan dengan Bimbingan dan Evaluasi mulai dari pelaksanaan sampai dengan tersusunnya laporan :

- 02.01. Penyusunan Jangka Pendek
- 02.02. Penyusunan Jangka Menengah
- 02.03. Penyusunan Jangka Panjang (SKN)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

03. LAPORAN

Naskah-naskah berkaitan dengan bahan pelaporan yang meliputi :

- Rapat Kerja DPR
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR
- Sidang Kabinet
- Politik Sosial, Keamanan (Polsoskam)
- Rapat Koordinasi Staf (Rakorstaf)
- Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri (Ekuin)
- Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)

LB : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mulai dari penyusunan rancangan sampai dengan selesai diterbitkan keputusan :

- 01.01. Sistem dan Kebijakan Kesehatan
- 01.02. Biomedis dan Farmasi
- 01.03. Ekologi dan Status Kesehatan
- 01.04. Gizi dan Makanan

02. PELAYANAN PENELITIAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelayanan, Pembinaan dan Pengembangan Penelitian Kesehatan :

- 02.01. Sistem dan Kebijakan Kesehatan
- 02.02. Biomedis dan Farmasi
- 02.03. Ekologi dan Status Kesehatan
- 02.04. Gizi dan Makanan

03. PENGKAJIAN DAN PENAPISAN TEKNOLOGI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengkajian dan Penapisan Teknologi Penelitian dan Pengembangan Kesehatan :

- 03.01. Sistem dan Kebijakan Kesehatan
- 03.02. Biomedis dan Farmasi
- 03.03. Ekologi dan Status Kesehatan
- 03.04. Gizi dan Makanan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

04. PROMOSI HASIL PENELITIAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyebarluasan Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan :

- 04.01. Sistem dan Kebijakan Kesehatan
- 04.02. Biomedis dan Farmasi
- 04.03. Ekologi dan Status Kesehatan
- 04.04. Gizi dan Makanan

05. EVALUASI DAN LAPORAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan :

- 05.01. Sistem dan Kebijakan Kesehatan
- 05.02. Biomedis dan Farmasi
- 05.03. Ekologi dan Status Kesehatan
- 05.04. Gizi dan Makanan

KK : PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi dan kebijakan bidang Penanggulangan Krisis dan masalah Kesehatan Lain mulai dari rancangan sampai dengan diterbitkan keputusan :

- 01.01 Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan
- 01.02 Tanggap Darurat dan Pemulihan
- 01.03 Pemantauan dan Informasi

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bimbingan, Pengendalian dan Evaluasi mulai dari pelaksanaan sampai dengan tersusunnya laporan :

- 02.01 Pencegahan Mitigasi dan Kesiapsiagaan
- 02.02 Tanggap Darurat dan Pemulihan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

PK : PROMOSI KESEHATAN

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi bidang Promosi Kesehatan mulai dari rancangan sampai dengan selesai diterbitkan keputusan :

- 01.01. Pembinaan kemitraan dan Peranserta
- 01.02. Teknologi dan Sarana Promosi Kesehatan

02. PELAKSANAAN PROMOSI KESEHATAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pelaksanaan atau Penyelenggaraan Promosi Kesehatan :

- 02.01. Pameran
- 02.02. Iklan
- 02.03. Spanduk
- 02.04 Brosur / Bulletin
- 02.05 Sayembara
- 02.06 Festival

03. BIMBINGAN DAN EVALUASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bimbingan dan Evaluasi mulai dari pelaksanaan sampai dengan tersusunnya laporan :

- 03.01 Pembinaan kemitraan dan peranserta
- 03.02 Teknologi dan Sarana Promosi Kesehatan

PM : PEMBERANTASAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Standardisasi Bidang Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mulai dari perencanaan sampai dengan selesai diterbitkan keputusan :

- 01.01. Surveilans Epidemiologi
- 01.02. Kesehatan Matra
- 01.03. Imunisasi
- 01.04. Karantina Kesehatan
- 01.05. Kesehatan Haji
- 01.06. Tuberkulosis



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 01.07. AIDS dan Penyakit Menular Seksual
- 01.08. Infeksi Saluran Pernafasan Akut
- 01.09. Diare, Kecacingan dan Infeksi Saluran Pencernaan
- 01.10. Kusta dan Frambusia
- 01.11. Malaria
- 01.12. Arbovirosis
- 01.13. Zoonosis
- 01.14. Filariasis dan Schistosomiasis
- 01.15. Pengendalian Vektor
- 01.16. Jantung dan Pembuluh Darah
- 01.17. Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik
- 01.18. Penyakit Kanker
- 01.19. Penyakit Kronis dan Degeneratif
- 01.20. Gangguan Akibat Kecelakaan dan Cidera
- 01.21. Penyehatan Air
- 01.22. Pengawasan Kualitas Lingkungan
- 01.23. Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
- 01.24. Sanitasi Makanan dan Bahan Pangan
- 01.25. Pengamanan Limbah

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bimbingan dan Evaluasi mulai dari pelaksanaan sampai dengan tersusunnya laporan :

- 02.01. Surveilans Epidemiologi
- 02.02. Kesehatan Matra
- 02.03. Imunisasi
- 02.04. Karantina Kesehatan
- 02.05. Kesehatan Haji
- 02.06. Tuberkulosis
- 02.07. AIDS dan Penyakit Menular Seksual
- 02.08. Infeksi Saluran Pernafasan Akut
- 02.09. Diare, Kecacingan dan Infeksi Saluran Pencernaan
- 02.10. Kusta dan Frambusia
- 02.11. Malaria



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 02.12. Arbovirosis
- 02.13. Zoonosis
- 02.14. Filariasis dan Schistosomiasis
- 02.15. Pengendalian Vektor
- 02.16. Jantung dan Pembuluh Darah
- 02.17. Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik
- 02.18. Penyakit Kanker
- 02.19. Penyakit Kronis dan Degeneratif
- 02.20. Gangguan Akibat Kecelakaan dan Cidera
- 02.21. Penyehatan Air
- 02.22. Pengawasan Kualitas Lingkungan
- 02.23. Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
- 02.24. Sanitasi Makanan dan Bahan Pangan
- 02.25. Pengamanan Limbah

PP : PUSAT SARANA, PRASARANA DAN PERALATAN KESEHATAN

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Standardisasi Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan, Peralatan Kesehatan mulai dari perencanaan sampai dengan selesai diterbitkan keputusan :

- 01.01. Sarana dan Prasarana Kesehatan
- 01.02. Peralatan Kesehatan

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bimbingan dan Evaluasi mulai dari pelaksanaan sampai dengan tersusunnya laporan :

- 02.01. Sarana dan Prasarana Kesehatan
- 02.02. Peralatan Kesehatan

YF : BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN.

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi bidang Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan sampai dengan selesai diterbitkan keputusan :



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 01.01. Penggunaan Obat Rasional
- 01.02. Promosi Penggunaan Obat Rasional
- 01.03. Obat Essensial Nasional
- 01.04. Farmasi Komunitas
- 01.05. Farmasi Klinik
- 01.06. Kerjasama Profesi
- 01.07. Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- 01.08. Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- 01.09. Alat Kesehatan Elektromedik
- 01.10. Alat Kesehatan Non Elektromedik
- 01.11. Produk Diagnostik dan Reagensia
- 01.12. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bimbingan dan Evaluasi bidang Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan mulai dari pelaksanaan sampai dengan tersusunnya laporan :

- 02.01. Penggunaan Obat Rasional
- 02.02. Promosi Penggunaan Obat Rasional
- 02.03. Obat Essensial Nasional
- 02.04. Farmasi Komunitas
- 02.05. Farmasi Klinik
- 02.06. Kerjasama Profesi
- 02.07. Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- 02.08. Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
- 02.09. Alat Kesehatan Elektromedik
- 02.10. Alat Kesehatan Non Elektromedik
- 02.11. Produk Diagnostik dan Reagensia
- 02.12. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

03. PENGELOLAAN OBAT

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan obat yang meliputi :

- 03.01. Pelayanan Penyangga Obat Pusat (*Buffer Stock*)
- 03.02. Pelayanan Kesehatan Dasar
- 03.03. Program Obat Nasional



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

03.04. Program Obat Essensial

YM : PELAYANAN MEDIK

01. PENYUSUNAN STANDARDISASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standardisasi bidang Pelayanan Medik mulai dari perencanaan sampai dengan selesai diterbitkan keputusan :

- 01.01. Pelayanan Medik Dasar di institusi
- 01.02. Pelayanan Kedokteran Keluarga
- 01.03. Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga
- 01.04. Pelayanan Medik Gawat Darurat dan Evakuasi
- 01.05. Pelayanan Medik Komplementer dan Alternatif
- 01.06. Pelayanan Medik Spesialistik di RSUD Pendidikan
- 01.07. Pelayanan Medik Spesialistik di RSUD Non Pendidikan
- 01.08. Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Khusus
- 01.09. Penapisan Teknologi Pelayanan Medik Spesialistik
- 01.10. Akreditasi Sarana Kesehatan Pelayanan Medik Spesialistik
- 01.11. Pelayanan Keperawatan Dasar
- 01.12. Pelayanan Keperawatan Spesialistik
- 01.13. Pelayanan Keperawatan Intensif
- 01.14. Pelayanan Keperawatan Kebidanan
- 01.15. Pelayanan Keperawatan Keluarga
- 01.16. Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi
- 01.17. Pelayanan Patologi dan Toksikologi
- 01.18. Pelayanan Radiologi
- 01.19. Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik
- 01.20. Akreditasi dan Pemantapan Mutu Penunjang Medik
- 01.21. Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarana Kesehatan
- 01.22. Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarana Non Kesehatan
- 01.23. Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
- 01.24. Pelayanan Kesehatan Jiwa Dewasa dan lanjut Usia
- 01.25. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA, Rokok dan Alkohol



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

02. BIMBINGAN DAN EVALUASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bimbingan dan Evaluasi bidang Pelayanan Medik mulai dari pelaksanaan sampai dengan tersusunnya laporan:

- 02.01. Pelayanan Medik Dasar di institusi
- 02.02. Pelayanan Kedokteran Keluarga
- 02.03. Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga
- 02.04. Pelayanan Medik Gawat Darurat dan Evakuasi
- 02.05. Pelayanan Medik Komplementer dan Alternatif
- 02.06. Pelayanan Medik Spesialistik di RSUD Pendidikan
- 02.07. Pelayanan Medik Spesialistik di RSUD Non Pendidikan
- 02.08. Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Khusus
- 02.09. Penapisan Teknologi Pelayanan Medik Spesialistik
- 02.10. Akreditasi Sarana Kesehatan Pelayanan Medik Spesialistik
- 02.11. Pelayanan Keperawatan Dasar
- 02.12. Pelayanan Keperawatan Spesialistik
- 02.13. Pelayanan Keperawatan Intensif
- 02.14. Pelayanan Keperawatan Kebidanan
- 02.15. Pelayanan Keperawatan Keluarga
- 02.16. Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi
- 02.17. Pelayanan Patologi dan Toksikologi
- 02.18. Pelayanan Radiologi
- 02.19. Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik
- 02.20. Akreditasi dan Pemantapan Mutu Penunjang Medik
- 02.21. Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarana Kesehatan
- 02.22. Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarana Non Kesehatan
- 02.23. Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
- 02.24. Pelayanan Kesehatan Jiwa Dewasa dan lanjut Usia
- 02.24.1. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah NAPZA,
Rokok dan Alkohol



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

III. FASILITATIF

HK : HUKUM

01. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Naskah-naskah yang berisi tentang tata cara (prosedur, metode, teknis pelaksanaan tupoksi) peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari penyusunan s.d ditetapkan terdiri dari:

01.01. Produk Hukum (TAP MPR, UU, PP, Keppres)

02. PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT MENGATUR

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Produk Hukum yang sifatnya Mengatur, terdiri dari :

02.01. Kepmenkes

02.02. Peraturan Menkes

02.03. Instruksi Menkes

02.03.1. Keputusan Pejabat Eselon I

03. PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT MENETAPKAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Produk Hukum yang sifatnya Menetapkan, terdiri dari :

03.01. Kepmenkes

03.02. Peraturan Menkes

03.03. Instruksi Menkes

03.04. Surat Keputusan Bersama (SKB) tingkat Menteri

03.05. Keputusan Pejabat Eselon I

04. PRODUK HUKUM YANG BERSIFAT ARAHAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Produk Hukum yang bersifat arahan, terdiri dari :

04.01. Pidato/Sambutan Pimpinan

04.02. Memo/Notulen Rapim

05. TELAAHAN HUKUM

Naskah-naskah yang berhubungan dengan bantuan teknis dari segi hukum serta penelaahannya yang berkaitan dengan masalah kesehatan:



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 05.01. Berkaitan Dengan Kasus
- 05.02. Berkaitan Dengan Perumusan Produk Hukum

06. PERJANJIAN KERJASAMA (MOU) / KONTRAK

Naskah-naskah yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama mulai dari penyusunan sampai dengan penandatanganan, terdiri atas :

- 06.01. Kerjasama di Dalam Negeri
 - Antar Instansi Pemerintah
 - Dengan Instansi / Organisasi Non Pemerintah
- 06.02. Kerjasama Dengan Luar Negeri
 - Antar Pemerintah
 - Dengan Instansi / Organisasi Non Pemerintah

07. PERIJINAN

Naskah-naskah yang berisi tentang ijin yang dikeluarkan oleh Depkes (baik personil maupun institusi) mulai dari permohonan sampai dengan di terbitkan ijin :

- 07.01. Perdagangan Besar Farmasi
- 07.02. Produksi Obat Tradisional
- 07.03. Distribusi Obat Tradisional
- 07.04. Edar Obat Tradisional
- 07.05. Ekspor & Impor Obat Tradisional
- 07.06. Pedirian Rumah Sakit
- 07.07. Pendirian Klinik Bersalin
- 07.08. Pendirian Apotik

08. BANTUAN HUKUM

Naskah-naskah yang berkenaan bantuan hukum mulai dari proses awal sampai dengan kasus selesai, yang terdiri dari :

- 08.01. Perdata.
- 08.02. Pidana
- 08.03. Tata Usaha Negara



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

IR : INFORMATIKA

01. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan dan pengembangan sistem informasi kesehatan yang meliputi :

- 01.01. Penyusunan
- 01.02. Pengembangan
 - SDM
 - Sistem
- 01.03. Pengembangan metode dan standar sistem informasi
- 01.04. Pengelolaan sistem informasi kesehatan

02. PENYEDIAAN DAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI KESEHATAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang meliputi :

- 02.01. Pengumpulan dan pengolahan data
- 02.02. Analisis dan penyebaran data/inforamsi
- 02.03. Pelayanan Data

03. BANK DATA

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan dan koordinasi bank data kesehatan tingkat pusat dan daerah yang meliputi :

- 03.01. Pengelolaan
- 03.02. Pembinaan
- 03.03. Koordinasi

KM : KOMUNIKASI PUBLIK

01. HUBUNGAN PERS DAN MEDIA MASSA

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan hubungan dengan media massa yang meliputi :

- 01.01. Liputan
- 01.02. Wawancara
- 01.03. Pertemuan Media Massa



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

02. PENDAPAT UMUM DAN BERITA

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan pendapat umum dan berita mulai dari penyaringan, pengolahan sampai dengan penyajian :

- 02.01. Pendapat Umum
- 02.02. Penyajian Berita
- 02.03. Kliping/Berita Kesehatan
 - Media Cetak
 - Media Elektronik
 - Kliping Elektronik

03. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan hubungan antar Lembaga yang meliputi :

- 03.01. Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Ormas, Organisasi Profesi, Bakohumas, dll)
- 03.02. Lembaga Tinggi Negara (MPR, DPR, MA, Dewan Pimpinan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dll)

04. PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan perpustakaan dan dokumentasi :

- 04.01. Perpustakaan
- 04.02. Dokumentasi

KP : KEPEGAWAIAN

01. PENGADAAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan pegawai mulai dari usulan sampai dengan pengangkatan pegawai meliputi :

- 01.01. Formasi
 - Perencanaan Kebutuhan Pegawai / PTT
 - Nota Persetujuan Formasi Pegawai
- 01.02. Penerimaan Calon Pegawai
 - Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai/PTT
 - Seleksi Administrasi
 - Pemanggilan Peserta Tes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Pelaksanaan Ujian Tertulis
- Keputusan Hasil Ujian
- Wawancara/Litsus
- Penetapan Tahap Akhir
- Pengumuman Kelulusan

01.04. Pengangkatan

- Usulan Pengangkatan
- Pemeriksaan Kesehatan Capeg
- Nota Usulan Capeg ke BKN
- Nota Persetujuan Capeg dari BKN
- SK. Calon Pegawai Negeri Sipil
- SK Kolektif
- SK Perseorangan
- Penempatan Capeg /PTT
- SK. Penugasan PTT

02. TATA USAHA KEPEGAWAIAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi :

02.01. Izin :

- Kawin/Cerai
- Ijin Tugas Belajar di Dalam Negeri
- Pendidikan Spesialisasi
- Praktek Tenaga Medis/Paramedis
- Praktek Tenaga Medis/Paramedis Asing

02.02. Keterangan :

- Data Keluarga
- Statistik Kepegawaian
- Karsu /Karis

02.04. Data Perorangan

02.05. NIP/Kartu Pegawai

02.06. DUK (Daftar Urut Kepangkatan)

02.07. Penugasan/Penunjukan Surat Perintah

02.08. Sumpah Pegawai



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

02.09. Spesimen Tanda Tangan

03. PEMBINAAN PEGAWAI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pembinaan pegawai meliputi :

03.01. Penelitian

- Absensi
- DP3
- Dupak
- Akreditasi
- Monitoring

03.02. Penghargaan

- Piagam
- Lencana
- Plakat

03.03. Hukuman

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin PNS mulai dari usulan sampai dengan diterbitkannya keputusan :

- Teguran tertulis
- Penundaan KGB
- Penundaan Kenaikan pangkat
- Penurunan Pangkat
- Pembebasan Dari Jabatan

04. MUTASI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan mutasi pegawai mulai dari usulan sampai dengan persetujuan, meliputi :

04.01. Kenaikan Pangkat

- Ujian dinas

04.02. Kenaikan Gaji Berkala

04.03. Penyesuaian

- Masa kerja
- Ijazah
- Tunjangan keluarga
- Gaji / Impassing



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

04.04. Pengangkatan dalam Jabatan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengangkatan dalam jabatan (Struktural dan Fungsional) mulai dari usulan sampai dengan diterbitkannya keputusan.

04.05. Penetapan Angka Kredit

Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional mulai dari usulan sampai dengan diterbitkan keputusan.

04.06. Pemindahan dan Penarikan

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemindahan dan penarikan PNS / PTT yang meliputi:

- Antar unit (Internal)
- Diperbantukan
- Dipekerjakan
- Penarikan
- Lolos butuh

05. KESEJAHTERAAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan layanan kesejahteraan pegawai yang meliputi :

05.01. Pemeriksaan Kesehatan

- Pejabat
- Pegawai
- Ke luar negeri

05.02. Cuti

- Tahunan
- Alasan penting
- Bersalin
- Sakit
- Besar
- Di luar tanggungan negara

05.03. Jasa

- Asuransi
- Askes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Taspen
- Santunan

06. PEMBERHENTIAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai yang meliputi :

06.01. Pensiun.

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pensiun pegawai mulai dari usulan sampai dengan diterbitkan keputusan meliputi :

- Telah mencapai batas usia pensiun
- Permintaan Sendiri
- Meninggal Dunia

06.02. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses pemberhentian pegawai karena melanggar disiplin PNS mulai dari usulan sampai dengan diterbitkannya keputusan.

07. PERKUMPULAN PEGAWAI / NON PEGAWAI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkumpulan/organisasi yang meliputi:

- 07.01. Korpri
- 07.02. Dharma Wanita
- 07.03. Koperasi
- 07.04. Organisasi profesi
- 07.05. Organisasi non profesi

KR : KERUMAHTANGGAAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelayanan kerumahtanggaan yang meliputi :

01. PELAYANAN

- 01.01. Umum
 - Peminjaman ruangan
 - Peminjaman sarana & prasarana kantor
- 01.02. Khusus
 - Pelayanan kepada pimpinan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

02. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perbaikan sarana yang meliputi :

02.01. Barang Tidak Bergerak

- Gedung/bangunan, kendaraan, alat kesehatan, alat kantor
- Instalasi Vital

02.02. Barang Bergerak

- Kendaraan roda empat dan dua
- Peralatan kerja
- Alat kesehatan
- Alat kantor
- Alat bantu lainnya

03. PENGAMANAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengamanan sarana yang meliputi:

03.01. Barang bergerak

03.02. Barang tidak bergerak

03.03. Instalasi vital

04. KETERTIBAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan ketertiban yang meliputi :

04.01. Lingkungan Kerja

04.02. Sarana Kerja

KU : KEUANGAN

01. TATA LAKSANA ANGGARAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Tata Laksana Anggaran yang meliputi :

01.01. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

01.02. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

01.03. Surat Perintah Membayar (SPM)

01.04. SPJ

- LS Gaji, Lembur, Kontrak
- UP

01.05. Subsidi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 01.06. Perhitungan Anggaran
- 01.07. Pendapatan Negara Bukan Pajak
- 01.08. Evaluasi dan Pelaporan Anggaran

02. PERBENDAHARAAN

Naskah-naskah yang berkaitan Perbendaharaan dan Keuangan yang meliputi :

- 02.01. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
- 02.02. Utang Piutang Negara
- 02.03. Berita Acara Pemeriksaan Keuangan
- 02.04. Surat Keputusan Bendaharawan

03. VERIFIKASI DAN AKUNTANSI

Laporan yang merupakan realisasi anggaran dan neraca keuangan :

- 03.01. Penilaian laporan
- 03.02. SK Tim Teknis/Pelaksana Verifikasi & Akuntansi
- 03.03. Penyampaian Laporan Keuangan
- 03.04. Pengumpulan Data Laporan Keuangan

04. BANTUAN LUAR NEGERI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Bantuan Luar Negeri yang meliputi:

- 04.01. ICP/Reguler Budget/Bantuan Luar Negeri/KSLN
- 04.02. Surat Permintaan Pembayaran BLN/Proyek BLN
- 04.03. Surat Pertanggungjawaban BLN

OT : ORGANISASI DAN TATALAKSANA

01. PENATAAN KELEMBAGAAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan perubahan, pembentukan dan penyempurnaan organisasi di Departemen Kesehatan mulai dari penyusunan sampai dengan selesai ditetapkan :

- 01.01. Penyusunan kelembagaan
- 01.02. Evaluasi penataan kelembagaan
- 01.03. Penyusunan standarisasi pelayanan minimal
- 01.04. Penyusunan akuntabilitas kinerja.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

02. ANALISA JABATAN DAN KETATALAKSANAAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Analisa Jabatan dan Ketatalaksanaan yang meliputi :

- 02.01. Analisa jabatan
- 02.02. Analisa kinerja
- 02.03. Tatalaksana
- 02.04. Pengembangan jabatan fungsional

PL : PERLENGKAPAN

01. PENGADAAN BARANG DAN JASA

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi:

- 01.01 Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
- 01.02 Telaahan pelaksanaan lelang/pemilikan/penunjukan langsung

02. PENYIMPANAN BARANG DAN DISTRIBUSI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyimpanan barang sampai pendistribusian yang meliputi :

- 02.01. Penyimpanan Inventaris Kekayaan Negara (IKN)
 - Surat Bukti Barang Masuk
 - Surat Bukti Pengeluaran Barang
- 02.02. Pendistribusian
 - Surat Jalan.

03. PEMANFAATAN DAN PENGHAPUSAN BARANG

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penghapusan barang yang meliputi :

- 03.01. Pemanfaatan Inventaris Kekayaan Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan IKN meliputi:
 - Rekomendasi
 - Surat Keputusan
- 03.02. Penghapusan Inventaris Kekayaan Negara
Naskah-naskah yang berkaitan dengan penghapusan IKN meliputi :
 - Surat Keputusan
 - Berita Acara



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

04. PERHITUNGAN TARIF JASA

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Prosedur Perhitungan Tarif Jasa mulai dari penyusunan sampai dengan selesai ditetapkan :

03.01. Pedoman

05. PENATAUSAHAAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penatausahaan IKN sampai dengan pelaporannya :

04.01. Laporan

- KIR, KIB, KIL, LMBT, LTI

PR : PERENCANAAN & ANGGARAN

01. PERENCANAAN & ANGGARAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan perencanaan Program Pembangunan Kesehatan yang meliputi :

01.01. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

01.02. Rencana Strategis (Renstra)

01.03. Rencana Kerja Pembangunan (RKP)

01.04. Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja KL)

01.05. Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL)

01.06. Surat Rencana Alokasi Anggaran (SRAA)

01.07. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

01.08. Petunjuk Teknis Perencanaan dan Anggaran

01.09. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK)

01.10. Indeks Standar Biaya Khusus (ISBK)

02. KERJASAMA LUAR NEGERI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perencanaan Kerjasama Luar Negeri secara :

03.01 Bilateral

03.02 Multilateral

03.03 Regional/Internasional



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

03. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan yang meliputi :

03.01. Data dan Informasi Anggaran

- Pidato Presiden
- Nota Keuangan/RAPBN
- Laporan Tahunan
- Dan lain-lain

03.02. Evaluasi

- APBN
- PHLN
- DAK
- Kinerja
- Program Lainnya

PS : PENGAWASAN

01. PENYUSUNAN PEDOMAN PENGAWASAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Pedoman, Kebijakan Pengawasan yang meliputi :

- 01.01. Petunjuk Pengawasan
- 01.02. Petunjuk Penentuan
- 01.03. Petunjuk Penilaian
- 01.04. Petunjuk Pengujian
- 01.05. Petunjuk Pengusutan

02. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penyusunan Program Kerja Pengawasan yang meliputi :

- 02.01. Pengawasan
- 02.02. Pemeriksaan
- 02.03. Penilaian
- 02.04. Pengujian
- 02.05. Pengusutan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

03. PELAKSANAAN PENGAWASAN

Naskah-naskah yang berkaitan Dengan Pelaksanaan Program Pengawasan yang meliputi :

- 03.01. Pengawasan Bidang Keuangan
 - Anggaran Rutin
 - Proyek
 - Bantuan Luar Negeri
 - Non Budgeter /Taktis
- 03.02. Pengawasan Bidang Kepegawaian
- 03.03. Pengawasan Bidang Perlengkapan
- 03.04. Pengawasan Umum
 - Pengaduan langsung
 - Pengaduan tidak langsung (TP 5.000)
 - Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)

04. LHP

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan APF Itjen, BPKP, BPK yang meliputi :

- 04.01. Pembuatan tabulasi LHP
- 04.02. Penyelesaian tindak lanjut
- 04.03. Pemutakhiran data tindak lanjut

TU : KETATAUSAHAAN

01. PERJALANAN DINAS

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perjalanan Dinas dalam negeri maupun luar negeri mulai dari proses surat penugasan sampai dengan keberangkatan yang meliputi :

- 01.01. Dokumen Perjalanan Dinas Dalam Negeri
 - Ijin
- 01.02. Dokumen Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
 - Ijin
 - Paspor
 - Visa
- 01.03. Laporan Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- 01.04. Laporan Perjalanan Dinas Luar Negeri



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

02. PENUGASAN TENAGA AHLI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Penugasan Tenaga Ahli yang meliputi :

02.01. Tenaga Ahli Dalam Negeri di Luar Negeri

- SP Setneg

02.02. Tenaga Ahli Luar Negeri di Indonesia

- SP Setneg
- Ijin Tinggal
- Ijin Kerja
- Surat Keterangan Laporan Diri
- Ijin Keluar Masuk

03. PENATAUSAHAAN PERALATAN BANTUAN LUAR NEGERI

Naskah-naskah yang berkaitan dengan prosedur administrasi Peralatan Bantuan Luar Negeri yang meliputi :

03.01. Barang Bergerak

03.02. Barang Tidak Bergerak

03.03. Barang- barang lainnya

04. PENATAUSAHAAN PENGELOLAAN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengelolaan Petugas Kesehatan Haji Indonesia mulai dari perencanaan rekrutmen sampai dengan keberangkatan ke Arab Saudi.

04.01. Rekrutmen

04.02. Pelatihan

04.03. Keberangkatan

04.04. Evaluasi

05. KEARSIPAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan Pengelolaan Kearsipan yang meliputi :

05.01. Pengelolaan Surat Masuk

05.02. Pengiriman Surat Keluar

05.03. Layanan Arsip

05.04. Penataan Arsip

05.05. Penyusutan Arsip



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

06. PENCETAKAN DAN PENGGANDAAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian pelayanan Pencetakan Dan Penggandaan yang meliputi :

- 06.01. Fotokopi
- 06.02. Cetak

07. KEPROTOKOLAN

Naskah-naskah yang berkaitan dengan acara pimpinan dan tamu Negara yang meliputi :

- 07.01. Acara Pimpinan
 - Kunjungan Kerja
 - Rapat Dengar Pendapat DPR
 - Raker DPR
- 07.02. Kunjungan Tamu Dalam Negeri
- 07.03. Kunjungan Tamu dari Luar Negeri
- 07.04. Upacara
- 07.05. Acara Penyelenggaraan Hari Besar Nasional
- 07.06. Acara Penyelenggaraan Hari Besar Dunia
- 07.07. Acara Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan

08. RAPAT

Naskah-naskah yang berkaitan dengan acara Rapat yang meliputi :

- 08.01 Undangan
- 08.02 Rapat Kerja
- 08.03 Rapat Koordinasi Pimpinan
- 08.04 Rapat Koordinasi Staf
- 08.05 Rapat Koordinasi Lintas Sektor
- 08.06 Rapat Koodinasi Lintas Program
- 08.07 Rapat Rekonsiliasi
- 08.08 Rapat Rutin



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran II

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1415/MENKES/SK/XII/2006

Tanggal : 15 Desember 2006

**KODE UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KESEHATAN**

Kode Unit Pengolah di lingkungan Departemen Kesehatan perlu ditetapkan dalam rangka mendukung keseragaman pemberian nomor surat dinas Departemen Kesehatan. Kode Unit Pengolah disusun berdasarkan struktur organisasi Departemen Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tanggal 16 November 2005.

A. SEKRETARIAT JENDERAL

I. Biro Perencanaan dan Anggaran

1. Bagian Perencanaan
2. Bagian Penyusunan Anggaran
3. Bagian Kerjasama Luar Negeri
4. Bagian Evaluasi dan Pelaporan

II. Biro Kepegawaian

1. Bagian Pengadaan Pegawai
2. Bagian Mutasi Pegawai
3. Bagian Pengembangan Pegawai
4. Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai

III. Biro Keuangan dan Perlengkapan

1. Bagian Tatalaksana Keuangan
2. Bagian Perbendaharaan
3. Bagian Verifikasi dan Akuntansi
4. Bagian Perlengkapan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

IV. Biro Hukum dan Organisasi

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan
2. Bagian Pelayanan Hukum
3. Bagian Kelembagaan
4. Bagian Analisa Jabatan dan Ketatalaksanaan

V. Biro Umum

1. Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol
2. Bagian Tata Usaha Departemen
3. Bagian Rumah Tangga
4. Bagian Keuangan dan Gaji Sekretariat Jenderal

VI. Pusat Data dan Informasi

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pengembangan Sistem
3. Bidang Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi
4. Bidang Pengembangan Bank Data

VII. Pusat Kajian Pembangunan Kesehatan

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Kajian Pembangunan Kesehatan Jangka Pendek
3. Bidang Kajian Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah dan Panjang

VIII. Pusat Promosi Kesehatan

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Kemitraan dan Peranserta
3. Bidang Teknologi dan Sarana Promosi Kesehatan

IX. Pusat Penanggulangan Krisis

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan
3. Bidang Tanggap Darurat dan Pemulihan
4. Bidang Pemantauan dan Informasi



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

X. Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Kepesertaan
3. Bidang Pemeliharaan Kesehatan
4. Bidang Pembiayaan

XI. Pusat Komunikasi Publik

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Hubungan Pers, Media Masa dan Perpustakaan
3. Bidang Pendapat Umum dan Berita
4. Bidang Hubungan Antar Lembaga

XII. Pusat Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Sarana dan Prasarana Kesehatan
3. Bidang Peralatan Kesehatan

B. DIREKTORAT JENDERAL BINA KESEHATAN MASYARAKAT

I. Sekretariat Direktorat Jenderal

1. Bagian Program dan Informasi
2. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

II. Direktorat Bina Kesehatan Ibu

1. Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Hamil
2. Subdirektorat Bina Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas
3. Subdirektorat Bina Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi
4. Subdirektorat Bina Kesehatan Keluarga Berencana
5. Subdirektorat Bina Perlindungan Kesehatan Reproduksi

III. Direktorat Bina Kesehatan Anak

1. Subdirektorat Bina Kesehatan Bayi
2. Subdirektorat Bina Kesehatan Anak Balita dan Pra Sekolah
3. Subdirektorat Bina Kesehatan Anak Usia Sekolah



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Subdirektorat Bina Kesehatan Anak Remaja
5. Subdirektorat Bina Kesehatan Anak Khusus

IV. Direktorat Bina Kesehatan Komunitas

1. Subdirektorat Bina Institusi Kesehatan Dasar dan UKBM
2. Subdirektorat Bina Upaya Kesehatan Perkotaan dan Olahraga
3. Subdirektorat Bina Upaya Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
4. Subdirektorat Bina Upaya Kesehatan Indera dan Usia Lanjut
5. Subdirektorat Bina Upaya Kesehatan Tradisional

V. Direktorat Bina Gizi Masyarakat

1. Subdirektorat Bina Gizi Makro
2. Subdirektorat Bina Gizi Mikro
3. Subdirektorat Bina Gizi Klinik
4. Subdirektorat Bina Konsumsi Makanan
5. Subdirektorat Bina Kewaspadaan Gizi

VI. Direktorat Bina Kesehatan Kerja

1. Subdirektorat Bina Promosi Kesehatan Kerja
2. Subdirektorat Bina Kedokteran Kerja
3. Subdirektorat Bina Ergonomi
4. Subdirektorat Bina Kapasitas Kerja
5. Subdirektorat Bina Lingkungan Kerja

C. DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK

I. Sekretariat Direktorat Jenderal

1. Bagian Program dan Informasi
2. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

II. Direkorat Bina Pelayanan Medik Dasar

1. Subdirektorat Bina Palayanan Medik Dasar di Institusi
2. Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Keluarga



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Subdirektorat Bina Pelayanan Kedokteran Gigi Keluarga
4. Subdirektorat Bina Pelayanan Medik Gawat Darurat dan Evakuasi
5. Subdirektorat Bina Pelayanan Medik Komplementer dan Alternatif

III. Direktorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik

1. Subdirektorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Umum Pendidikan
2. Subdirektorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Umum Non Pendidikan
3. Subdirektorat Bina Pelayanan Medik Spesialistik di Rumah Sakit Khusus
4. Subdirektorat Bina Penapisan Teknologi Pelayanan Medik Spesialistik
5. Subdirektorat Bina Akreditasi Sarana Kesehatan Pelayanan Medik Spesialistik

IV. Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan

1. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Dasar
2. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Spesialistik
3. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Intensif
4. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Kebidanan
5. Subdirektorat Bina Pelayanan Keperawatan Keluarga

V. Direktorat Bina Pelayanan Penunjang Medik

1. Subdirektorat Bina Pelayanan Mikrobiologi dan Imunologi
2. Subdirektorat Bina Pelayanan Patologi dan Toksikologi
3. Subdirektorat Bina Pelayanan Radiologi
4. Subdirektorat Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterampilan Fisik
5. Subdirektorat Bina Akreditasi dan Pemantapan Mutu Penunjang Medik

VI. Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa

1. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarana Kesehatan
2. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa di Sarana Non Kesehatan
3. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
4. Subdirektorat Bina Pelayanan Kesehatan Jiwa Dewasa dan Lanjut Usia
5. Subdirektorat Bina Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Napza, Rokok dan Alkohol



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

D. DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

I. Sekretariat Direktorat Jenderal

1. Bagian Program dan Informasi
2. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

II. Direktorat Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Kesehatan Matra

1. Subdirektorat Surveilans Epidemiologi
2. Subdirektorat Kesehatan Matra
3. Subdirektorat Imunisasi
4. Subdirektorat Karantina Kesehatan
5. Subdirektorat Kesehatan Haji

III. Direktorat Pengendalian Penyakit Menular Langsung

1. Subdirektorat Tuberkulosis
2. Subdirektorat AIDS dan Penyakit Menular Seksual
3. Subdirektorat Infeksi Saluran Pernafasan Akut
4. Subdirektorat Diare, Kecacingan dan Infeksi Saluran Pencernaan Lainnya
5. Subdirektorat Kusta dan Frambusia

IV. Direktorat Pengendalian Bersumber Binatang

1. Subdirektorat Malaria
2. Subdirektorat Arbovirosis
3. Subdirektorat Zoonosis
4. Subdirektorat Filariasis dan Schistosomiasis
5. Subdirektorat Pengendalian Vektor

V. Direktorat Pengendalian Penyakit Tidak Menular

1. Subdirektorat Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
2. Subdirektorat Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik
3. Subdirektorat Penyakit Kanker
4. Subdirektorat Penyakit Kronis dan Degeneratif Lainnya
5. Subdirektorat Gangguan Akibat Kecelakaan dan Cedera



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

VI. Direktorat Penyehatan Lingkungan

1. Subdirektorat Penyehatan Air
2. Subdirektorat Pengawasan Kualitas Lingkungan
3. Subdirektorat Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat
4. Subdirektorat Sanitasi Makanan dan Bahan Pangan
5. Subdirektorat Pengamanan Limbah

E. DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

I. Sekretariat Direktorat Jenderal

1. Bagian Program dan Informasi
2. Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

II. Direktorat Bina Penggunaan Obat Rasional

1. Subdirektorat Standardisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Obat Rasional
2. Subdirektorat Promosi Penggunaan Obat Rasional
3. Subdirektorat Bina Obat Esensial Nasional

III. Direktorat Bina farmasi Komunitas dan Klinik

1. Subdirektorat Farmasi Komunitas
2. Subdirektorat Farmasi Klinik
3. Subdirektorat Kerjasama Profesi

IV. Direktorat Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

1. Subdirektorat Penyediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
2. Subdirektorat Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

V. Direktorat Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan

1. Subdirektorat Alat Kesehatan Elektromedik
2. Subdirektorat Alat Kesehatan Non Elektromedik
3. Subdirektorat Produk Diagnostik dan Reagensia
4. Subdirektorat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

F. INSPEKTORAT JENDERAL

I. Sekretariat Inspektorat Jenderal

1. Bagian Program dan Informasi
2. Bagian Analisis dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
3. Bagian Pengaduan Masyarakat
4. Bagian Umum

II. Inspektorat I

1. Subbagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

III. Inspektorat II

1. Subbagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

IV. Inspektorat III

1. Subbagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

V. Inspektorat IV

1. Subbagian Tata Usaha
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

G. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

I. Sekretariat Badan

1. Bagian Perencanaan dan Anggaran
2. Bagian Hukum, Organisasi dan Kepegawaian
3. Bagian Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Promosi Penelitian
4. Bagian Umum dan Keuangan

II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Kesehatan

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Program dan Kerjasama
3. Bidang Pelayanan Penelitian



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

III. Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Program dan Kerjasama
3. Bidang Pelayanan Penelitian

IV. Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekologi dan Status Kesehatan

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Program dan Kerjasama
3. Bidang Pelayanan Penelitian

V. Pusat Penelitian dan Pengembangan Gizi dan Makanan

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Program dan Kerjasama
3. Bidang Pelayanan Penelitian

**H. BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN**

I. Sekretariat Badan

1. Bagian Program dan Informasi
2. Bagian Tata Usaha Kepegawaian
3. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
4. Bagian Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat

II. Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Bidang Perencanaan dan Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Bidang Kemandirian dan Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Bidang Tugas Belajar, Evaluasi dan Laporan SDM Kesehatan

III. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan

1. Bidang Program dan Sumberdaya
2. Bidang Pengembangan Kurikulum
3. Bidang Kendali Mutu



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

IV. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesehatan

1. Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan
2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjurangan dan Manajemen Kesehatan
3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

V. Pusat Pemberdayaan Profesi dan Tenaga Kesehatan Luar Negeri

1. Bidang Perencanaan Program
2. Bidang Pemberdayaan
3. Bidang Evaluasi dan Pemantauan



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp. JP (K)